

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah buta aksara adalah masalah dunia. Bahkan UNESCO melalui Deklarasi Dakar 2000 telah mendeklarasikan bahwa masalah buta aksara adalah masalah dunia. Penyandang buta aksara terbanyak berada di dunia ketiga atau di negara berkembang. Indonesia termasuk katagori negara berkembang. Dengan demikian Indonesia harus bertanggung jawab untuk menuntaskan penduduknya yang masih terpapar buta aksara.

Penyandang buta aksara akan berkorelasi dengan kualitas sumber daya manusia. Indeks pengembangan Sumber daya Manusia (Human Development Index). Salah satu indikator HDI adalah kemampuan dalam pendidikan. Buta aksara adalah masalah pendidikan terutama pendidikan non formal. Upaya pemberantasan buta aksara dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Kenaikan angka masih harus berhadapan dengan kenaikan buta huruf kembali. Sebagai gambaran secara nasional angka buta aksara di Provinsi Aceh termasuk tinggi diantara sekian provinsi lainnya.

Menjadikan masyarakat agar melek aksara bukan hal mudah. Ada sejumlah faktor yang ada sebagai penghambat bahkan melekat di hati masyarakat. Faktor psiko-sosial, faktor fisik, faktor budaya, faktor geografis adalah sejumlah faktor dominan yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Penyandang buta aksara terutama pada usai produktif (25-40 tahun), akan menjadi beban

pemerintah, karena keterbatasannya sehingga bukan merupakan aset pembangunan yang produktif.

Menjadikan seseorang agar melek aksara merupakan bagian dari kegiatan pendidikan. Undang-undang pendidikan No. 20 tahun 2003 mengamanatkan bahwa satuan pendidikan ada tiga yakni pendidikan in formal, pendidikan formal dan pendidikan formal. Ketika masyarakat tidak atau belum berkesempatan mengikuti pendidikan formal, maka pendidikan non formal adalah wadahnya. Pendidikan non formal memiliki garapan demikian luas mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan usia produktif dan usia lanjut. Pendidikan non formal merupakan jalur bagi mereka yang tidak atau berkesempatan mengikuti pendidikan formal. Beberapa ahli memberikan nama atau definisi untuk pendidikan formal sebagai *out of school education, the shadow school system*. Pendidikan non formal sengaja dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar masyarakat, sehingga pendidikan non formal ditujukan untuk pembentukan skill dan pengetahuan di luar pendidikan formal. Secara eksplisit kemampuan yang akan diraih dalam pendidikan non formal yakni kemampuan berkomunikasi, kemampuan produktif dan kemampuan memperbaiki diri dalam kehidupan masyarakat. Pemberantasan tributa sebagai salah satu bentuk pendidikan nonformal paling kurang memberikan kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi dan perbaikan kualitas diri. Secara kelompok pendidikan non formal merupakan bentuk *Community Development* dalam bentuk pendidikan.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan Bangsa dan Negara. Kemajuan suatu kebudayaan bergantung kepada cara Bangsa dan

Negara tersebut mengenali, menghargai dan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) dan hal ini berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anggota masyarakatnya (Munandar, 2002).

Pendidikan adalah salah satu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya. Dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan berfungsinya secara kuat dalam kehidupan bermasyarakat (Fajar, 1999).

Pendidikan, juga bisa diartikan sebagai proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya didalam masyarakat di mana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum (Ikhsan, 1996).

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang mutlak bagi semua manusia, secara umum pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2006 Bab IV pasal 5 ayat 1 “Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” dan pasal 5 ayat 5 “Setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat” (UU Sisdiknas). Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat yang kurang beruntung dalam mengenyam pendidikan berhak mendapatkan kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan secara penuh sebagai Warga Negara Indonesia.

Mencari ilmu bukan hanya untuk anak-anak pada masa sekolah saja, tetapi mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, pria maupun wanita. Kewajibannya tidak terbatas pada masa remaja, tetapi sampai tuapun kewajiban mencari ilmu tidak pernah berhenti (Al Mundiri, 1995).

Dalam rangka memajukan sumber daya manusia, berbagai upaya pemberdayaan banyak dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Salah satunya, bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam layanan pendidikan, terutama kepada warga masyarakat yang dapat dikatakan kurang beruntung baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan. Wujud pemberdayaan bagi masyarakat, yang selama ini digerakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) adalah dengan menggerakkan program penuntasan buta aksara.

Tujuan strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat terdapat dalam Rencana Strategi Pembangunan Aceh Barat yaitu terwujudnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan produk pendidikan.

Pemerintah daerah sudah saatnya mengambil peran penting dalam mencerdaskan kehidupan warganya. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Anggaran 20 persen dari APBK juga merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkannya. Apalagi kalau ditinjau dari amanat yang terkandung dalam UU Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yang mengharuskan pemerintah kabupaten/kota untuk menganggarkan dana pendidikan sebesar 30 persen dari APBK.

Persoalan buta aksara bagi negara berkembang seperti Indonesia masih saja menjadi isu sentral. Buta aksara adalah keadaan dimana seseorang tidak dapat membaca dan menulis. Padahal membaca dan menulis merupakan salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keaksaraan fungsional dikembangkan dari bawah ke atas menggunakan suatu proses partisipatif untuk menciptakan model pembelajaran berdisain lokal. Keaksaraan fungsional merupakan suatu metode pendekatan belajar yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan membaca, menulis, berhitung, berpikir, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang bersumber dari lingkungan sekitar (Setiawan, 2007).

Metode pendekatan belajar Keaksaraan Fungsional ini dikembangkan karena karakter atau orientasi belajar orang dewasa lebih bersifat praktis dan fungsional serta sesuai dengan potensi dan kebutuhan belajar mereka. Oleh karena itu penyelenggaraan program Keaksaraan Fungsional, tidak semata-mata memberikan kemampuan baca, tulis, hitung serta kemampuan berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar akan tetapi lebih jauh memberikan keterampilan-keterampilan fungsional yang bermakna bagi kehidupan warga belajar sehari-hari sehingga mereka mampu meningkatkan mutu kehidupannya (Disdik Aceh Barat).

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana urgensi dari pada program keaksaraan fungsional, maka dari itu, penulis mengadakan penelitian dengan mengangkat judul: Strategi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengurangi Buta Aksara Di Kabupaten Aceh Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat dalam pemberantasan buta aksara di Kabupaten Aceh Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pemberantasan buta aksara di Kabupaten Aceh Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat menemukan atau menghasilkan pelaksanaan program pemberantasan buta aksara di kabupaten Aceh Barat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna sebagai acuan atau referensi bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka menghasilkan pelaksanaan program pemberantasan buta aksara di kabupaten Aceh Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar para pembaca lebih mudah memahami maksud dan tujuan yang dikehendaki, maka sistematika pembahasan penulisan penelitian ini disusun

sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam pembahasan ini, yang dipaparkan secara detail dalam penulisan skripsi ini yaitu, pendahuluan yang terdiri dari beberapa Sub Bab, antara lain: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan kajian teori, berisi tentang kajian-kajian teoritis yang berfungsi untuk membantu mempermudah dalam permasalahan ini yang berhubungan dengan objek kajian (penelitian). Dalam pembahasan ini penulis memaparkan pengertian strategi, buta aksara dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III Metode penelitian di bab ini memberikan uraian mengenai rancangan penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, termasuk didalamnya teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV merupakan Hasil penelitian dan pembahasan berupa: Gambaran Umum lokasi kajian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan Penutup, yaitu berupa kesimpulan dan Saran-Saran.